

UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI KELUARGA DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI SMPN 1 SALATIGA

Kania Rosyulianty, Aswandi, Wahyudi
Program Pascasarjana FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Email: nia.kr.1972@gmail.com

Abstract

The nine-year compulsory program programmed by the government is a continuation of previous educational programs. The goal is to provide the basic right for the community to obtain educational services. To achieve that goal one of the factors that determine its success is the presence of family participation on education. Related to that, the researcher conducted a study at SMP Negeri 1 Salatiga Kabupaten Sambas. Research questions are directed to: How aspirations, expectation, planning and implementation, as well as barriers to the program of increasing family participation in the framework of 9-year compulsory education at SMP Negeri 1 Salatiga Kabupaten Sambas. To express the question the researcher uses a qualitative research approach type of case study research. To gather data and information from informants, researchers used observation, interviews, and document studies in the process of collecting research data. The results revealed that; The aspirations of the family are generally good, the expectation / success of the essence is very high, the planning is done early in the inhibiting factors such as low economic condition of the parents and the pattern of life that has not changed.

Kata kunci: Partisipasi, Pendidikan, Wajib Belajar 9 Tahun

PENDAHULUAN

Paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang memperlakukan anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anak menemukan bakat atau minatnya. Paradigma pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak azasi manusia minimal pada tingkat pendidikan dasar.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa. Pembiayaan

pendidikan oleh pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan yang berkeadilan, agar peserta didik tidak terhambat mengakses pendidikan karena tidak mampu secara ekonomis. Peserta didik yang kurang mampu secara ekonomis perlu mendapat bantuan pendidikan.

Sedangkan yang berprestasi tinggi perlu mendapat beasiswa. Yang penting setiap anak di Indonesia berhak dan wajib menikmati pendidikan 9 tahun yang mencakup 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP sederajat.

Dasar hukum pelaksanaan wajib menikmati pendidikan 9 tahun bagi warga negara Indonesia antara lain adalah UUD 1945, pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global.

Millennium Development Goals (MDGs) yang menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100%. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar semua manusia Indonesia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sambas mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Program wajib belajar sembilan tahun sifatnya anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan yang mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pada gilirannya program ini mampu menuntaskan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang SLTP. Sementara itu, orang tua yang memiliki anak usia sekolah dianjurkan, bahkan diwajibkan menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang tersebut. Meskipun para orang tua yang tidak mengindahkan program ini tidak mendapatkan sanksi hukum, diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyukseskan program ini. Tanggung jawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan anaknya, tapi juga menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Nilai sosial budaya yang dianut dan diamalkan oleh suatu masyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang dimaksud disini adalah hal-hal yang di anggap baik dan diyakininya. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan diagungkan dalam mengambil keputusan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi program wajib belajar sembilan tahun adalah persepsi orangtua tentang pendidikan, Persepsi orangtua terhadap

pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orangtua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi disini adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orangtua terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya.

Selain faktor yang sifatnya perspektif, ada latar belakang lain yang mendasari pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, antara lain faktor geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, dan sarana prasarana pendidikan. Faktor geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, mereka sebagian masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional.

Masalah ini bukan karena anak tidak mau, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik, disamping faktor geografis juga usaha menanamkan pengertian tentang pentingnya pendidikan karena pola hidup yang terbelakang.

Permasalahan kurangnya partisipasi pihak keluarga terhadap pendidikan pada intinya disebabkan oleh tradisi masyarakat yang terbelakang. Paling tidak fenomena di lokasi penelitian, menunjukkan hal tersebut. Contoh gugus 3 Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, terdapat anggapan masyarakat bahwa menyekolahkan anak akan merugikan keluarga. Alasannya adalah dengan sekolah anak-anak akan malas kerja, tak lagi dapat membantu orang tua di sawah atau ladang atau pekarangan, menjadi pandai dan akhirnya berani pada orangtua, atau bersekolah akhirnya juga akan menganggur karena mencari pekerjaan amat sulit, sementara banyak sarjana yang masih nganggur.

Alasan seperti ini selalu mewarnai pola pandang para masyarakat pedesaan yang pekerjaannya sebagai petani, khususnya gugus 3 Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas. Sebagai masyarakat petani tenaga kerja sangat penting, anak-anak juga merupakan tenaga kerja bagi keluarga yang bersangkutan. Tradisi bertani, berladang, dan bercocok tanam lainnya melahirkan suatu kebiasaan menggunakan anak istri sebagai tenaga kerja murah. Dengan demikian, akhirnya anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah.

Mereka beranggapan bahwa anak perempuan disekolahkan tidak ada manfaatnya sebab biarpun bersekolah tinggi akhirnya akan kembali juga, yaitu tugasnya sebagai istri yang harus di dapur dan beranak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau di daerah di pedesaan yang sebenarnya masih dalam usia sekolah terpaksa harus dinikahkan. Ditambah lagi adanya alasan bahwa tanggung jawab keluarga adalah laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, sementara pihak perempuan hanya mengikuti saja.

Berdasarkan data dinas pendidikan tahun 2014-2015 data angka putus sekolah SD/MI adalah sebesar 30.63% sedangkan untuk SLTP dan MTS sebesar 32,45 (*diknas Kabupaten Sambas, 2015*). Sedangkan untuk anak usia sekolah (7-15) di gugus 3 Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas yang masih banyak ditemukan anak yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SLTP. Tingginya angka putus sekolah dikecamatan salatiga tidak lepas dari peranan keluarga terutama orang tua salah satunya yaitu berkewajiban melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya di rumah, maka anak-anak tersebut perlu diberikan motivasi belajar agar lebih bersemangat dan bergairah sehingga memiliki prestasi dalam belajar.

Anak-anak usia sekolah, walaupun telah diberikan motivasi oleh guru, maka perlu didukung oleh orang tua dalam memberikan motivasi tersebut. Padahal, motivasi yang baik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri siswa yang bersangkutan untuk belajar secara aktif di rumah maupun di sekolah. Motivasi yang diberikan oleh orang tua merupakan daya penguat saja dalam rangka membangkitkan

gairah dan semangat belajarnya. Paling tidak, fenomena di lokasi penelitian, menunjukkan hal tersebut.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Aspirasi keluarga terhadap pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; (2) Expectasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; (3) Perencanaan program peningkatan partisipasi keluarga oleh kepala sekolah dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; (4) Pelaksanaan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; dan (5) Hambatan pelaksanaan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pendidikan yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada pendidikan dasar sembilan tahun. Jadi setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Seperti yang diketahui oleh masyarakat umum, pendidikan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional.

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dimulai sejak Pelita IV. Pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan

dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Peningkatan pendidikan wajib belajar, menjadi pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 sebagai berikut (1) Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia adalah: (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, (3) tidak diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Hardiyansyah (2011:22) mengemukakan bahwa pada pemerintahan kita pendidikan dasar diterjemahkan dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pendidikan dasar tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Idielnya pemerintah mensubsidi penuh pendidikan dasar ini sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang untuk tidak mampu menyekolahkan anaknya dan pemerintah hendaknya menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah.

Menurut Dadi Permadi (2009:72) motivasi adalah dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif. Seorang pemimpin dapat memberikan motivasi

pada bawahannya agar dia berbuat baik atau lebih baik. Motivasi yang diberikan oleh seorang pemimpin akan sangat bermanfaat dalam rangka menggerakkan perilaku bawahan menuju apa yang diharapkan. Disamping itu. Seorang pemimpin juga harus mempunyai motif yang positif yang dapat mengembangkan dirinya agar menjadi pemimpin yang berhasil.

Dalam rangka menjadi pemimpin yang berhasil, Dadi Permadi (2009:72-74) menyatakan bahwa perlu adanya motif-motif yang menjadi suatu lingkaran dari beberapa motif sebagai berikut; (1) motif untuk memeriksa kekuatan, (2) kepedulian, (3) aktif mendengar, (4) mencari kekuatan lain, (5) mencari hal-hal yang bisa menguatkan orang lain, (6) keterlibatan, (7) memimpin dengan memberi contoh, (8) ganjaran., (9) pengembangan, dan (10) mengharapakan yang terbaik.

Lee Iacoca dalam Staphen P. Rabbins – Timothy A.Judge (2008:266) menyatakan bahwa motivasi adalah segalanya. Anda bisa melakukan pekerjaan dua orang, tetapi Anda tidak bisa menjadi dua orang. Malahan Anda harus menginspirasi orang di bawah Anda dan membuatnya menginspirasi orang-orangnya.

Selanjutnya Staphen P. Rabbins – Timothy A.Judge (2008:266-284) menyatakan bahwa memotivasi dapat dilakukan dengan cara-cara, mengubah lingkungan kerja, kinerja membuahkan hasil, keterlibatan karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan.

Aspirasi dapat diartikan sebagai keinginan hati nurani individu untuk mencapai suatu kondisi yang lebih bermakna bagi kehidupannya. Keinginan hati nurani menunjukkan bahwa aspirasi yang dimaksudkan sangat kuat karena bersumber dari kata hati, nilai-nilai pribadi dan tuntutan perkembangan individu bersangkutan. Kondisi yang bermakna mengandung arti kondisi pada diri individu itu sendiri maupun kondisi lingkungannya lebih mendukung, memudahkan, menyenangkan, menguntungkan dan hal-hal positif lainnya bagi kehidupannya (<http://www.kompasiana.com/konselor-irsyad.blogspot.com/asasi-aspirasi54f91713a333115f378b4bd5>).

Pokok-pokok pengertian ini memberi kan asosiasi bahwa aspirasi ibarat nafas kehidupan. Hidupnya organisme ditandai adanya tiupan nafas. Hasrat, keinginan dan cita-cita merupakan nafas kehidupan. Tiap individu memiliki keinginan dalam hidupnya, yaitu keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih berarti; lebih tinggi dan lebih besar daripada yang sudah dicapai.

Hal yang umum tentang keinginan semua orang, misalnya, adalah ingin kesenangan; ingin kebahagiaan, ingin bebas dari ketakutan dan kesedihan. Aspirasi, dengan demikian, hampir tanpa batas. Orang bisa beraspirasi sekuat-kuatnya untuk mencapai sesuatu setinggi-tingginya. Ia merupakan variabel yang dinamis (<http://www.kompasiana.com/konselorirsyad.blogspot.com/asasi-aspirasi-54f91713a333115f378b4bd5>).

Menurut <http://www.kompasiana.com/konselorirsyad.blogspot.com/asasi-aspirasi-54f91713a333115f378b4bd5>, bahwa dalam psikologi, istilah aspirasi digunakan terutama dalam Teori Lapangan (*Field Theory*) yang dibangun oleh Kurt Lewin (1890-1947). Dalam teori Lewin tentang lapangan kehidupan (*life space*), aspirasi merupakan salah satu lingkungan-kehidupan (*life-sphere*) yang berdimensi maya (*irreality*), termasuk kebutuhan, harapan, cita-cita dan sebagainya, sedangkan lingkungan seperti ayah, ibu, teman, pekerjaan dan sebagainya merupakan lingkungan-kehidupan nyata (*reality*).

Dalam teori ini, aspirasi merupakan salah satu daya (*force*) yang mendorong suatu tingkah laku. Perubahan-perubahan lingkungan-kehidupan pada diri individu, menurut Teori Lapangan, disebabkan faktor pengalaman hidup sehari-hari, pertambahan usia, intelegensi dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa aspirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor pada diri individu dan interaksinya dengan lingkungan. Dalam Teori Konseling Panca Waskita yang dikembangkan oleh Prayitno sejak 1998, aspirasi merupakan salah satu dari lima kondisi individu (*masidu*) yang memberi pengaruh secara langsung terhadap tingkah laku dan permasalahan individu.

Faktor dari luar diri individu yang mempengaruhi aspirasi serta empat kondisi

lainnya adalah lima kekuatan di luar individu, yaitu (1) gizi; (2) pendidikan; (3) sikap dan perlakuan; (4) budaya; dan (5) kondisi insidental. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi individu serta komponen *masidu* lainnya. Faktor-faktor tersebut pada sisi lainnya juga merupakan sumber permasalahan pada diri individu (<http://www.kompasiana.com/konselorirsyad.blogspot.com/asasi-aspirasi-54f91713a333115f378b4bd5>).

Aspirasi merupakan suatu kekuatan dan kondisi di dalam diri individu yang merupakan salah satu penentu tingkah laku dan masalah-masalah yang dialaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi individu tidak lain daripada hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya serta masalah-masalah yang dialaminya.

Expectasi itu artinya harapan besar yang di bebaskan pada sesuatu yang di anggap akan mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik dari sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu (<http://vthreeorange.blogspot.co.id/2011/05/teori-harapan-expectancy-theory.html>).

Teori harapan ini didasarkan atas : (1) Harapan (*Expectacy*), adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. (2) Nilai (*Valence*) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai / martabat tertentu (*daya/nilai motivasi*) bagi setiap individu yang bersangkutan. (3) Pertautan (*Instrumentality*) adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama

Exspectasi merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Exspectasi merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Karena dengan adanya usaha yang keras tersebut, maka hasil yang didapat akan sesuai dengan tujuan. Dalam

teori ini disebutkan bahwa seseorang akan memaksimalkan usaha dan meminimalkan segala yang menghalangi pencapaian hasil maksimal.

Teori expectancy berasumsi bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk menghasilkan suatu karya pada waktu tertentu tergantung pada tujuan-tujuan khusus orang yang bersangkutan dan juga pemahaman seseorang tersebut tentang nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Expectasi menekankan pada hasil yang akan dicapai. Hasil yang diinginkan dipengaruhi oleh tujuan pribadi seseorang dalam mencakup kebutuhan. Dalam teori ini, seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya (<http://vthreeorange.blogspot.co.id/2011/05/teori-harapan-expectancy-theory.html>)

Penelitian yang dilakukan oleh Mi-Hee Jeon dan Charles E. Myers. Judul Penelitian *Triadic Model for Working with Parents in Child Therapy Settings*. Salah satu hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa orang tua adalah lingkungan sekitar dan tokoh penting dalam perkembangan anak, penanganan dan bimbingan orang tua secara efektif melalui keterlibatan orang tua sangat penting dalam mempromosikan proses terapeutik anak-anak. <http://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/36272>

2. Penelitian yang dilakukan Esther N. Waithaka. Judul Penelitian *Choice of the Medium of Instruction in Kenyan Preschools: Averting Xenocentrism*. Salah satu hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Hasilnya menunjukkan bahwa orang tua merasa sekolah yang menggunakan bahasa Inggris lebih unggul dibanding bahasa ibu karena dunia telah berubah menjadi desa global <http://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/36272>.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penerapan pendekatan ini dapat dilihat dari; proses pengolahan data tidak menggunakan perhitungan statistik (Moleong, 2012:3), latar belakang alamiah dengan peneliti sebagai alat pengumpul data utama dan lebih memperhatikan proses dari pada hasil (Moleong, 2012:11), bersifat deskriptif (Satori dan Komariah, 2010:28). berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi (Emzir, 2014:20). Peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang sedemikian keadaannya (Moleong, 2012:11).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspirasi Keluarga Terhadap Pendidikan Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 1 Salatiga Kecamatan Salatiga

Pendekatan humanistik adalah titik tolak atau sudut pandang yang bersifat kemanusiaan. Teori humanistik memandang tujuan belajar adalah untuk ‘memanusiakan manusia’. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri (Hendy Hermawan: 2010:37). Artinya penentuan strategi memandang keunikan siswa selaku insan yang memiliki kemampuan yang berbeda, oleh karena itu perlakuan atau pelayanan terhadap mereka pun berbeda. Pendekatan ini khusus ditujukan kepada orang tua siswa kelas IX untuk menghadapi US/UN di SMP Negeri 1 Salatiga.

Konsep pemberdayaan atau partisipasi pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan pendidikan menunjukkan ada kecenderungan bahwa kerjasama antar komponen dalam suatu institusi pendidikan memang perlu untuk dilakukan.

Pendekatan pemberdayaan atau partisipasi pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi)

demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Friedmann dalam Kartasamita ([http://www. Pemberdayaan.com](http://www.Pemberdayaan.com).) dalam hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Friedmann mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Sedangkan proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok, namun pemberdayaan melalui kelompok mempunyai keunggulan yang lebih baik, karena mereka dapat saling memberikan masukan satu sama lainnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dalam aktivitas usahanya setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahanya, pasti ada peran orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerjasama usaha (Neti Budiwati:2012).

Expectasi Keluarga Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 1 Salatiga Kecamatan Salatiga

Harapan keberhasilan wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga pada intinya sangat tinggi. Keberhasilan program ini tidak bisa lepas dari evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Salatiga dan salah satunya adalah ujian sekolah dan ujian nasional. Expectasi partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga berhasil apabila nilai US/UN naik, siswa semuanya melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga persentasinya 0. Demikian sebaliknya jika nilai US/UN yang didapat oleh siswa menurun, tidak siswa semua melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah

di SMP Negeri 1 Salatiga persentasinya meningkat dari tahun lalu maka expectasi partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga dianggap gagal dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan dokumen hasil rembuk pendidikan kecamatan Salatiga yang membahas tentang anak putus sekolah dan tidak melanjutkan, berharap agar partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan dengan cara dibentuk tim yang solid, melakukan memotivasi orang tua, ada hukuman/denda yang setimpal bagi yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya, kerjasama semua elemen masyarakat, memberikan beasiswa kepada siswa yang mau sekolah, serta pemerintah memfasilitasi tugas guru untuk mau melaksanakan tugas di daerah yang rawan putus sekolah..

Diakui bahwa, evaluasi merupakan bagian penting dari seluruh proses pelaksanaan suatu program di suatu institusi termasuk sekolah yaitu berpungsi sebagai umpan balik bagi sekolah atau kepala sekolah tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana berikutnya.

Bernardin dan Russel (1993:379) dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/> Kinerja mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Selanjutnya Cascio (1992:267) dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja> menegaskan bahwa penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok. Henry Simamora (2004:338) dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja> mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Dari hasil penilaian atau evaluasi tersebut dapat dilihat apakah expectasi atau harapan seseorang sesuai dengan kenyataan.

Expectasi adalah harapan besar yang di bebankan pada sesuatu yang di anggap akan mampu membawa dampak yang baik atau lebih

baik dari sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu (<http://vthreeorange.blogspot.co.id/2011/05/teori-harapan-expectancy-theory.html>).

Exspectasi merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Karena dengan adanya usaha yang keras tersebut, maka hasil yang didapat akan sesuai dengan tujuan.

Dengan demikian expectasi partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi program partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga khususnya dan kecamatan Salatiga pada umumnya.

Perencanaan Program Peningkatan Partisipasi Keluarga Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 1 Salatiga Kecamatan Salatiga

Berdasarkan hasil observasi, dokumen dan wawancara dengan kepala sekolah bahwa ada kecenderungan dalam merencanakan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga oleh kepala sekolah dasarnya melibatkan semua unsur sekolah, orangtua siswa dan komite sekolah serta kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salatiga, dan yang lebih penting lagi adalah dokumen hasil rembuk pendidikan kecamatan Salatiga yang membahas masalah partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga.

Perencanaan tersebut menurut Mulyono (2008:25-26) mengandung arti: *pertama*, manajer *memikirkan* dengan matang terlebih dahulu sasaran (tujuan) dan tindakan berdasarkan beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. *Kedua*, rencana *mengarahkan tujuan* organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. *Ketiga*, rencana merupakan *pedoman* untuk: (a) organisasi *memperoleh dan menggunakan* sumber daya yang diperlukan

untuk mencapai tujuan, (b) anggota organisasi *melaksanakan aktivitas* yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan, dan (c) *memonitor dan mengukur* kemajuan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila kemajuan tidak memuaskan.

Selanjutnya Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsudin Makmun (2009:33) menyatakan bahwa perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu organisasi antara lain: (a) diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan dan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan, (b) dengan adanya perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forcasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, (c) perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*), (d) dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, dan (e) dengan adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja.

Perencanaan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga oleh kepala sekolah mengandung unsur-unsur, prinsip-prinsip dan langkah-langkah perencanaannya sesuai dengan pendapat Mulyono (2008:25-26) serta sejalan dengan pandangan Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsudin Makmun (2009:33) tentang pentingnya membuat suatu perencanaan sebagai proses untuk menindaklanjuti suatu kebijakan yang baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Keluarga Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 1 Salatiga Kecamatan Salatiga

Hasil wawancara bahwa pelaksanaan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga, sangat didukung oleh *stakeholder* pendidikan di Kecamatan Salatiga. Hal ini terbukti dengan adanya pelaksanaan rembuk pendidikan kecamatan Salatiga. Selanjutnya

ditindaklanjuti oleh orangtua siswa agar selama anak-anak mereka akan menghadapi ujian tidak dibebani dengan mengasuh adik-adik mereka di rumah, mengurangi keterlibatan anak-anak mereka dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, selalu mengontrol keberadaan anak-anak mereka ketika tidak sudah pulang sekolah dan lebih fokus waktunya untuk belajar.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan, program atau keputusan bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran kebijakan, program atau keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Hardiyansyah (2011:22) mengatakan bahwa salah satu klasifikasi pelayanan publik adalah pendidikan dasar. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar. Lebih lanjut Hardiyansyah menyatakan ” Jika kita ingin mengetahui bangsa ini tiga atau lima puluh tahun yang akan datang, maka lihatlah anak-anak Sekolah Dasar kita sekarang”

Menurut Brewer dan Deleon dalam Sutjipto (1987:109) mengatakan bahwa implementasi merupakan fase yang penting dalam analisis kebijaksanaan tetapi sering kali dilupakan. Jika implementasi tidak dilakukan secara cermat, seleksi, dan ide-ide inovatif dalam proses kebijaksanaan hanya merupakan latihan intelektual semata-mata.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga, sangat didukung oleh *stakeholder* pendidikan di Kecamatan Salatiga, sejalan dengan pendapat

para pakar antara lain Sutjipto (1987:109) dan Hardiyansyah (2011:22)

Hambatan Partisipasi Keluarga Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 1 Salatiga Kecamatan Salatiga

Paktor pendukung partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga khususnya dan di kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas pada umumnya antara lain adalah adanya kemauan seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama menanggulangi permasalahan angka anak putus sekolah dan tidak melanjutkan di kecamatan Salatiga dengan lokakarya rembuk pendidikan tingkat Kecamatan Salatiga dan adanya bekerjasama dari semua elemen masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing.

Hasil lokakarya rembuk pendidikan kecamatan Salatiga yang membahas masalah angka anak putus sekolah dan tidak melanjutkan, bahwa faktor penghambat seperti kondisi ekonomi orangtua rendah, lingkungan dan sosial budaya yang melibatkan anak usia sekolah dalam kegiatan yang menyita banyak waktu anak untuk belajar, pengaruh lingkungan yang konsumtif dan hedonis seperti keinginan untuk memiliki sepeda motor dan HP, serta persepsi kurang baik terhadap para sarjana yang masih menganggur.

Sejalan dengan pendapat di atas, Robert L. Mathis dan John H. Jackson dalam Supriadi (2010:15) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: (1) Kemampuan mereka, (2) Motivasi, (3) Dukungan yang diterima, (4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, (5) Hubungan mereka dengan organisasi.

Selanjutnya Carl A. Grant (1978:3) mengatakan bahwa “*The current challenge to traditional forms of urban school government has been caused both by inadequacies of structure and performance in the schools and by broader social and political trends outside of the schools*”.(Tantangan saat ini terhadap bentuk tradisional pemerintahan sekolah kota disebabkan oleh kurangnya struktur dan kinerja di sekolah dan oleh kecenderungan sosial dan politik yang lebih luas di luar sekolah.)

Dengan demikian faktor penghambat partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga dilakukan sejalan dengan pendapat Robert L. Mathis dan John H. Jackson dalam Supriadi (2010:15 dan Carl A. Grant (1978:3).

PENUTUP

Kesimpulan

Aspirasi keluarga terhadap pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga pada umumnya baik. Untuk melaksanakannya, pihak sekolah melakukan pendekatan humanistik dan bersifat kekeluargaan untuk mengantisipasi hasil lokakarya rembuk pendidikan kecamatan Salatiga yang membahas masalah angka anak putus sekolah dan tidak melanjutkan.

Dalam rembuk tersebut disimpulkan bahwa faktor penyebab masalah angka anak putus sekolah dan tidak melanjutkan terjadi karena pengaruh lingkungan dalam hal ini adalah keinginan untuk memiliki alat transportasi dan komunikasi (motor dan HP) disisi lain kondisi ekonomi orangtua tidak mampu, banyak lulusan perguruan tinggi yang sudah sarjana (S1) yang tidak bekerja (menganggur) sehingga mulai tertanam dalam pikiran mereka persepsi kurang baik “sarjana saja menganggur”, untuk apa sekolah sampai sarjana banyak duit orang tua dihabiskan tapi hasilnya hanya menganggur.

Expectasi keluarga dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas pada intinya sangat tinggi. Keberhasilan program ini tidak bisa lepas dari evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Salatiga dan salah satunya adalah ujian sekolah dan ujian nasional. Expectasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga berhasil apabila nilai US/UN naik, siswa semuanya melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga persentasinya 0. Demikian sebaliknya jika nilai US/UN yang didapat oleh siswa menurun, tidak siswa semua melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga persentasinya meningkat dari tahun lalu maka expectasi

partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga dianggap gagal dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Oleh karena itu perlu dibentuk tim yang solid, melakukan memotivasi orang tua, ada hukuman/denda yang setimpal bagi yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya, kerjasama semua elemen masyarakat, memberikan beasiswa kepada siswa yang mau sekolah

Perencanaan motivasi partisipasi keluarga dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas ada kecenderungan melibatkan semua unsur sekolah, orangtua siswa dan komite sekolah serta kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salatiga, dan yang lebih penting lagi adalah dokumen hasil rembuk pendidikan kecamatan Salatiga yang membahas masalah partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga.

Pelaksanaan program peningkatan partisipasi keluarga dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMP Negeri 1 Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas sangat didukung oleh *stakeholder* pendidikan di Kecamatan Salatiga. Hal ini terbukti dengan adanya pelaksanaan rembuk pendidikan kecamatan Salatiga. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh orangtua siswa agar selama anak-anak mereka akan menghadapi ujian tidak dibebani dengan mengasuh adik-adik mereka di rumah, mengurangi keterlibatan anak-anak mereka dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, selalu mengontrol keberadaan anak-anak mereka ketika tidak sudah pulang sekolah dan lebih fokus waktunya untuk belajar.

Faktor penghambat partisipasi keluarga dalam rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga khususnya dan di kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas pada umumnya antara lain kondisi ekonomi orangtua rendah, lingkungan dan sosial budaya yang melibatkan anak usia sekolah dalam kegiatan yang menyita banyak waktu anak untuk belajar, pengaruh lingkungan yang konsumtif dan hedonis seperti keinginan untuk memiliki sepeda motor dan HP, serta persepsi kurang

baik terhadap para sarjana yang masih menganggur.

Saran

Kepada Pemerintah Kabupaten Sambas melalui UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salatiga agar lebih intensif merencanakan program Partisipasi Keluarga rangka wajib belajar 9 tahun di SMP Negeri 1 Salatiga khususnya dan di kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas pada umumnya yang lebih menyentuh kepada pola pikir dan sosial budaya masyarakat setempat dengan

terlebih dahulu melakukan seminar atau lokakarya yang melibatkan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menginventarisir permasalahannya, kemudian menindak lanjuti hasil seminar atau lokakarya tersebut.

Kepada para guru SMP Negeri 1 Salatiga, lebih semangat dan terus berinovasi agar peserta didik tidak bosan, dan akhirnya lembaga ini menjadi tujuan utama orangtua untuk anak-anaknya, anak betah dan senang berada di sekolah serta partisipasi masyarakat terhadap sekolah meningkat sesuai dengan kontribusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Carl A. Grant.1978. *Community participation in Education*. Boston. Allyn and Bascom.Inc.
- Djam'an Satori & Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Emzir.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Esther N. Waithaka. *Choice of the Medium of Instruction in Kenyan Preschools: Averting Xenocentrism*.<http://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/36077> . Akses 26-4-2017
- Hardiyansyah.2011. *Kualitas Pelayanan Publik.Konsep,Dimensi,Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta.Gaya Media
- Hendy Hermawan.2010. *Teori Belajar dan Motivasi*. Bandung: CV. Citra Praya. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>. Akses 19-6-2017
- <http://vthreeorange.blogspot.co.id/2011/05/teori-harapan-expectancy-theory.html> akses tanggal 2 -7-2017 pukul 13.40
- <http://www.kompasiana.com/konselor-irsyad.blogspot.com/asasi-aspirasi54f91713a333115f378b4bd5> akses tanggal 2 -7-2017 pukul 13.46
- Kartasamita.1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Online) <http://www.Pember-dayaan.com>. Akses 19-6-2017
- Mi-Hee Jeon, Charles E. Myers. *Triadic Model for Working with Parents in Child Therapy Settings*.<http://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/36054> . Akses 26-4-2017
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Neti Budiwati.2012. *Membangun Kerja Sama Usaha*. (Online). [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/Prodi._Ekonomi_dan_Koperasi/196302211987032-Neti_Budiwati/Membangun Kerja Sama Usaha](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/Prodi._Ekonomi_dan_Koperasi/196302211987032-Neti_Budiwati/Membangun%20Kerja%20Sama%20Usaha.pdf). pdf. Akses 19-6-2017
- Permadi, Dadi. 2009. *Kepemimpinan Mandiri (profesional) Kepala Sekolah: Kiat Memimpin yang Mengembangkan Partisipasi*. Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa.
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Buku I. Edisi 12 : Jakarta, Salemba Empat.
- Sutjipto.1987. *Analisis Kebijakan Pendidikan. Suatu Pengantar*. IKIP, Padang
- Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsudin Makmun. 2009. *Perencanaan Pendidikan. Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung : Alfabeta.
- UUD tahun 1945
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar